

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERENCANAAN ANGGARAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERIN) KABUPATEN BANDUNG

**Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA, A-CPA, MD.
Siti Nurhayani, S.Ak**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

This research aims to determine The Effect of Direct Expenditures and Indirect Expenditures to Budget Planning partially or simultaneously on the Office of Industry and Trade (DISPERIN) at Bandung Regency. The research method used descriptive and verification research methods with a quantitative approach.

The results of study indicate that partially Direct Expenditures have a significant effect to Budget Planning for the next year, where these results are evidenced by the results of the t test Direct Expenditures obtain t_{count} greater than t_{table} , is $-3.604 > 2.776$ with a significance value of 0.023 less than 0.05 ($0.023 < 0.05$). Then the Indirect Expenditures partially do not have a significant effect on the next year's Budget Planning. This is evidenced by the ttest for Indirect Shopping to obtain t_{count} smaller than t_{table} , is $2.238 < 2.776$ with a significance value of 0.089 greater than 0.05 ($0.089 < 0.05$). Simultaneously, Direct Expenditures and Indirect Expenditures have a significant effect to Budget Planning for the next year, this evidenced by the F test, the results of F_{count} is greater than F_{table} , is $7.639 > 6.94$ with a significance value of 0.043 less than 0.05 ($0.043 < 0.05$). It can be concluded that simultaneously Direct Expenditures and Indirect Expenditures have a significant effect to Budget Planning at the Office of Industry and Trade (DISPERIN) Bandung Regency.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Perencanaan Anggaran

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan diberbagai daerah dituntut agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya transformasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan begitu pemerintah daerah dapat dengan mudah mengembangkan daerah masing-masing dan juga dalam hal menyediakan pelayanan terhadap publik.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, dan pengeluaran, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, ototrisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Anggaran daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama pemerintah daerah.

Pengertian pemerintah menurut Siregar merupakan organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat. Berkaitan dengan tugasnya mengelola dana masyarakat, pemerintah dituntut untuk menerapkan akuntansi sebagai dasar dalam pengelolaan dana tersebut. Pengertian akuntansi dalam sektor publik juga diungkapkan

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung| Aditya Achmad Fathony,Siti Nurhayani

oleh Siregar yaitu aktivitas akuntansi yang diterapkan dan dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik termasuk pemerintahan.¹

Akuntansi di lingkungan pemerintahan harus diterapkan agar pengelolaan dana publik dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik pula kepada publik. Penerapan akuntansi ini harus dilakukan diseluruh struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pemerintah pusat bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam APBD. Dalam lingkup pemerintah daerah, dana yang tertuang dalam APBD itu disalurkan kembali kepada sturuktur pemerintahan di daerahnya untuk dikelola.

Salah satu struktur pemerintahan daerah yang menerapkan akuntansi dalam rangka mengelola dana publik adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Klasifikasi yang terdapat dalam rencana anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 serta perubahan kedua dengan adanya Permendagri No 21 Tahun 2011. Perubahan kedua tersebut terbagi atas dua macam belanja langsung dan tidak langsung.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kelompok belanja yang selanjutnya adalah kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok ini terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Perencanaan anggaran adalah kegiatan menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk sesuatu jangka waktu tertentu. Proses perencanaan anggaran ini menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung. Proses pembuatan rencana anggaran perlu memperhatikan beberapa hal yang harus diperhatikan agar rencana anggaran yang dibuat itu baik dan ketika proses pelaksanaan dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan serta dapat dipertanggungjawabkan, karena perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran.Masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan real di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi, sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.²

Sesuai yang dikatakan M.Nafarin 2007, salah satu poin yang dimaksud adalah data-data diwaktu yang lalu berupa data-data kinerja keuangan yaitu data laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung tahun sebelumnya. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran karena berisikan pertanggungjawaban kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

¹Silvia Dwi Aprianti, 'Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung', 2017, 1–15.

²Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara', 2004, 1–61.

Bandung berdasarkan klasifikasi anggaran secara keseluruhan yang berupa belanja langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perencanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh belanja langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.

c. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis :

1. Pengaruh belanja langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung periode 2013-2019.
2. Pengaruh belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung periode 2013-2019.
3. Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung secara simultan terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung periode 2013-2019.

d. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan serta evaluasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Diharapkan melalui penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi atau bahan untuk menambah wawasan serta pemikiran para akademisi yang akan melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bagi Peneliti
Mengembangkan wawasan peneliti, terlebih dalam rangka menerapkan hasil-hasil studi mengenai pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya dengan melakukan penelitian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung.
4. Bagi Pihak Lain
Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan, perbandingan pemikiran dan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.

II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

a. Pengertian Akuntansi

Menurut Soemarso S.R yang dikutip oleh Fathony dan Mahardika mendefinisikan akuntansi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.³

Sedangkan menurut Mulyadi, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.⁴ Menurut Erlina, sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.⁵

b. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia yang dikutip oleh Fathony dan Agustina, laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.⁶ Sedangkan menurut Dwi Martini, yang dikutip oleh Fathony dan Purnamasari, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) dan pertanggungjawaban sumber daya entitas yang telah dipercayakan kepadanya.⁷

c. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Erlina, akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah, atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat.⁸

Sedangkan menurut Sujarweni, akuntansi sektor publik adalah salah satu ilmu akuntansi yang digunakan untuk perusahaan nirlaba. Dalam akuntansi sektor publik terdiri dari akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi pendidikan,

³Aditya Achmad Fathony and Eka Mahardika, 'Pengaruh Modal Kerja Dan Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (ROI) (Studi Kasus Pada PT. PLN (PERSERO) APJ MAJALAYA Periode 2010-2016)', *Ilmiah Akuntansi - Akurat*, 9.2 (2018), 97–113 .

⁴Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi 4 (Jakarta : Salemba Empat, 2016), hal. 3.

⁵Erlina, Rambe, O.S, and Rasdianto, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*(Jakarta : Salemba Empat, 2015), hal. 4.

⁶Aditya Achmad Fathony and Hanalia Rizqi Agustina, 'Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Usyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Ihsan Periode 2012 – 2016', *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 9.3 (2018), 21–47.

⁷Aditya Achmad Fathony and Ratna Indah Purnamasari, 'Pengaruh Pinjaman Anggota Dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Operasional Pada Koperasi Kredit Buana Endah Tahun 2010-2016', *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8.3 (2017), 56–73.

⁸Erlina, dkk, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Salemba Empat, 2015).

akuntansi yayasan dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.⁹

d. Belanja Langsung

Menurut Erlina dan Omar Sakti, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.¹⁰ Sedangkan menurut Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, menyatakan bahwa penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan, konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.¹¹

e. Belanja Tidak Langsung

Menurut Erlina dan Omar Sakti, belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.¹² Sedangkan menurut Permendagri No 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.¹³

f. Perencanaan Anggaran

Menurut UU No 25 Tahun 2004, menyatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.¹⁴ Sedangkan menurut Indra Bastian yang dikutip oleh Aprianti, perencanaan anggaran adalah penjabaran rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelajaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹⁵

g. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, mengemukakan bahwa kerangka berfikir adalah kerangka pemikiran yang dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang asosiatif/hubungan maupun komparatif/perbandingan.¹⁶ Sedangkan menurut Dalman, kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan.¹⁷

⁹ Sujarweni, V.Wiratna. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. . (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 17.

¹⁰ Erlina, dkk, *Loc.Cit.* Hal 158

¹¹ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017', 2016.

¹² Erlina, dkk, *Loc.Cit.* Hal 155.

¹³ 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah', 2011, 1–24.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara', 2004, 1–61.

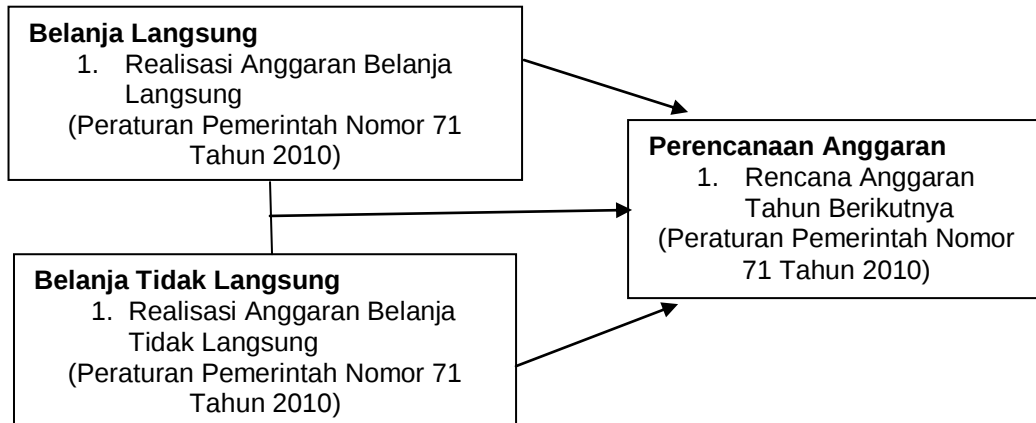
¹⁵ Aprianti, *Op.Cit.*

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 63.

¹⁷ Dalman, *Keterampilan Menulis* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 184.

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung| Aditya Achmad Fathony,Siti Nurhayani

Berikut bagan paradigma penelitian :



h. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Terdapat Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya Periode 2013-2019.
2. Diduga Terdapat Pengaruh Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya Periode 2013-2019.
3. Diduga Terdapat Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Tahun Berikutnya Periode 2013-2019.

III. Objek dan Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang harus diperhatikan yaitu objek penelitian yang akan diteliti. Dimana terdapat masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal yang objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu).¹⁸

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung. Sumber data yang diperlukan adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung tahun 2013 sampai dengan 2019.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹ Sedangkan menurut Suntoyo metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis, karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut.²⁰

Metode penelitian ini meliputi model dan operasionalisasi variabel, dimana model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif dan verifikatif yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama.

¹⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal.3.

¹⁹Sugiyono, *Op.cit.* Hal 2.

²⁰Suntoyo, *Metode Penelitian Akuntansi*, (Bandung : PT. Rafika Aditama Anggota Ikapi2013), hal. 19.

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan definisi mengenai variabel-variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari judul yang diteliti, sebagai berikut :

Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel independen (X ₁): Belanja Langsung	Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	a. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Nominal
Variabel independen (X ₂): Belanja Tidak Langsung	Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	a. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Nominal
Variabel dependen (Y): Perencanaan Anggaran	Perencanaan Anggaran adalah kegiatan menyusun pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu periode tertentu berdasarkan kebutuhan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Rencana Anggaran Tahun Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	Nominal

Sumber: data yang diolah kembali.

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono, analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.²¹

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Perencanaan Anggaran)

X₁ = Variabel bebas (Belanja Langsung)

X₂ = Variabel bebas (Belanja Tidak Langsung)

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal.275

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung| Aditya Achmad Fathony,Siti Nurhayani

a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X_1 , $X_2 = 0$
 b_1 , b_2 = Koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara X_1 dan X_2 terhadap Y. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan. Menurut Ghazali koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.²²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara matematis koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 . 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Koefisien Korelasi ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

d. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.²³

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi belanja langsung terhadap perencanaan anggaran dan belanja tidak langsung terhadap perencanaan anggaran. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono yaitu sebagai berikut:

²² Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi Ketujuh*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), hal. 98.

²³ Sugiyono, *Op.cit.* hal.64.

$$t_{hitung} = \frac{rp\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rp^2}}$$

Keterangan :

r_p = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} , selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk untuk melihat apakah belanja langsung dan belanja tidak langsung bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan anggaran. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Menurut Sugiyono F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

dk = $(n-k-1)$ derajat kebebasan.

Setelah itu, gunakan kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.247	9.863		5.601	.005
Belanja Langsung	-1.127	.313	-.840	-3.604	.023
Belanja Tidak Langsung	.862	.385	.521	2.238	.089

a. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 55,247 - 1,127 X_1 + 862 X_2$$

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung| Aditya Achmad Fathony,Siti Nurhayani

Keterangan:

Y = Perencanaan Anggaran

X₁ = Belanja Langsung

X₂ = Belanja Tidak Langsung

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 55,247
Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen atau Belanja Langsung (X₁) dan Belanja Tidak Langsung (X₂) nilainya 0, maka Perencanaan Anggaran (Y) adalah sebesar 55,247
2. Koefisien regresi Belanja Langsung (X₁) sebesar -1,127
Koefisien regresi (b₁) tersebut hasilnya negatif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel Belanja Langsung (X₁) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan Perencanaan Anggaran sebesar -1,127 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Belanja Tidak Langsung (X₂) sebesar 862
Koefisien regresi (b₂) tersebut hasilnya positif, ini menunjukkan adanya indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel Belanja Tidak Langsung (X₂) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Perencanaan Anggaran sebesar 862 dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X₁ dengan Y
Correlations

Control Variables			Belanja Langsung	Perencanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Correlation	1.000	-.874
		Significance (2-tailed)	.	.023
		df	0	4
	Perencanaan Anggaran	Correlation	-.874	1.000
		Significance (2-tailed)	.023	.
		df	4	0

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X₂ dengan Y
Correlations

Control Variables			Belanja Tidak Langsung	Perencanaan Anggaran
Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung	Correlation	1.000	.746
		Significance (2-tailed)	.	.089
		Df	0	4
	Perencanaan Anggaran	Correlation	.746	1.000
		Significance (2-tailed)	.089	.
		Df	4	0

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi Ganda (R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.793	.689	4.91659

a. Predictors: (Constant), Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung

b. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi parsial antara Belanja Langsung (X_1) dengan Perencanaan Anggaran (Y) adalah sebesar -0,874, dari nilai yang diperoleh berarti terdapat korelasi negatif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara tidak searah, artinya jika Belanja Langsung naik maka Perencanaan Anggaran akan mengalami penurunan. Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka -0,874. Jika melihat interval koefisien angka -0,874 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X_1 mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.
- Korelasi antara Belanja Tidak Langsung (X_2) dengan Perencanaan Anggaran (Y) adalah sebesar 0,746 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,746. Jika melihat interval koefisien angka 0,746 berada diantara 0,60-0,799 yang berarti variabel X_2 mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.
- Korelasi ganda antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan dengan Perencanaan Anggaran adalah sebesar 0,890. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perencanaan Anggaran secara simultan adalah searah, artinya jika Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung naik, maka Perencanaan Anggaranpun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,890 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 5
Hasil Uji Korelasi Ganda (R-Square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.793	.689	4.91659

a. Predictors: (Constant), Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung

b. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Dari tabel diatas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,793. Nilai *R Square* menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai $KD = 0,793$ (82,2%). Artinya, Perencanaan Anggaran dipengaruhi oleh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sebesar 79,3%.

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung | Aditya Achmad Fathony, Siti Nurhayani

4. Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Secara Parsial Belanja Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran

Tabel 6
Hasil Uji t (Parsial)
Pengaruh X_1 terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.247	9.863		5.601	.005
Belanja Langsung	-1.127	.313	-.840	-3.604	.023
Belanja Tidak Langsung	.862	.385	.521	2.238	.089

a. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Belanja Langsung(X_1) adalah sebesar -3,604 dengan signifikansi 0,023 sedangkan t_{tabel} dengan dk 7 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($-3,604 > 2,776$) dan taraf signifikansi (0,023) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Belanja Langsung secara parsial terdapat berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode 2013-2019.

b. Pengaruh Secara Parsial Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran

Tabel 7
Hasil Uji t (Parsial)
Pengaruh X_2 terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	55.247	9.863		5.601	.005
Belanja Langsung	-1.127	.313	-.840	-3.604	.023
Belanja Tidak Langsung	.862	.385	.521	2.238	.089

a. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Belanja Tidak Langsung(X_2) adalah sebesar 2,238 dengan signifikansi 0,089 sedangkan t_{tabel} dengan dk 7 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil dari pada t_{tabel} ($2,238 < 2,776$) dan taraf signifikansi (0,089) lebih besar daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Tidak Langsung secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode 2013-2019.

c. Pengaruh Secara Simultan Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran

Tabel 8
Hasil uji F (Simultan) Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	369.336	2	184.668	7.639	.043 ^a
Residual	96.691	4	24.173		
Total	466.027	6			

a. Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

b. Dependent Variable: Perencanaan Anggaran

Dari tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 7,639, sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 4 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,043, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 6,94. Karena F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($7,639 > 6,94$) dan taraf signifikansi yaitu ($0,043 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Periode 2013-2019.

V. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Perencanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Belanja Langsung secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2013-2019. Artinya setiap kenaikan atau penurunan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran, oleh sebab itu pemograman dan kegiatan Belanja Langsung harus dioptimalkan lagi sehingga dapat berpengaruh terhadap Perencanaan Anggaran tahun berikutnya.
2. Belanja Tidak Langsung secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan periode 2013-2019. Artinya setiap kenaikan Belanja Tidak Langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran tahun berikutnya, Oleh sebab itu belanja tidak langsung dan belanja langsung saling menegasikan/mempengaruhi sehingga mengakibatkan belanja tidak langsung memberikan pengaruh secara keseluruhan terhadap perencanaan anggaran tahun berikutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
3. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Perencanaan Anggaran. Artinya jika Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sama-sama mengalami kenaikan, maka Perencanaan Anggaran pun akan meningkat, begitupun sebaliknya, jika Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sama-sama mengalami penurunan maka Perencanaan Anggaran pun mengalami penurunan.

Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperin) Kabupaten Bandung| Aditya Achmad Fathony,Siti Nurhayani

b. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung dapat lebih menjaga serta dapat mengoptimalkan Anggaran yang diberikan untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seefisiensi mungkin, sebab hal ini menentukan naik turunnya Perencanaan Anggaran tahun berikutnya dilihat dari kinerja apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung program pemerintah dengan memberikan saran dan kritikan serta menyampaikan aspirasinya dengan baik sesuai dengan ketentuan sehingga pemerintah dapat bertanggungjawab atas dana publik yang telah dikelola dan kebijakan yang dibuat pemerintah dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas dan meneliti serta menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perencanaan anggaran seperti efisiensi dan efektifitas pengelolaan laporan keuangan, kinerja keuangan, serapan anggaran, dan pengalokasian belanja daerah. Selain itu, penulis menyarankan untuk menambah jumlah data yang diteliti untuk menambah keakuratan hasil penelitian juga dapat menggunakan unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

Daftar Pustaka

Dalman. 2016. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.

Erlina, Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metpde Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suntoyo. 2013. *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung : PT. Rafika Aditama Anggota Ikapi.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Jurnal Terdahulu

Aprianti, Silvia Dwi. 2017. Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Fathony, Aditya Achmad and Ratna Indah Purnamasari. 2017. *Pengaruh Pinjaman Anggota Dan Modal Sendiri Terhadap Pendapatan Operasional Pada Koperasi Kredit Buana Endah Tahun 2010-2016*, *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 8.3 , 56–73.

Fathony, Aditya Achmad and Eka Mahardika. 2018. *Pengaruh Modal Kerja Dan Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas (ROI) (Studi Kasus Pada PT. PLN (PERSERO) APJ MAJALAYA Periode 2010-2016)*, *Ilmiah Akuntansi - Akurat*, 9.2 , 97–113 .

Fathony, Aditya Achmad and Hanalia Rizqi Agustina. 2018. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Usyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Ihsan Periode 2012 – 2016*, *Akurat - Jurnal Ilmiah Akuntansi - Universitas Bale Bandung*, 9.3, 21–47.